

Analisis Investasi Pertambangan dan Perubahan Sosial Masyarakat di Aceh Barat

Fajar Ziyady^{1*}, Afriani Maifizar²

^{1,2}Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia
Email: fziyady@gmail.com^{1*}, afrianimaifizar@utu.ac.id²

Abstrak

Artikel ini menganalisis dampak investasi pertambangan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat di Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami dinamika sosial yang muncul akibat aktivitas pertambangan emas dan batu bara, baik yang berizin maupun ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi pertambangan telah mendorong peralihan mata pencaharian masyarakat dari sektor ekonomi tradisional menuju sektor ekstraktif, yang diikuti oleh meningkatnya ketergantungan ekonomi dan kerentanan sosial. Selain itu, aktivitas pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti degradasi hutan, pencemaran sungai, dan meningkatnya risiko bencana ekologis, yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Dampak lingkungan tersebut juga memicu konflik sosial, melemahkan solidaritas komunitas, serta memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Secara sosiologis, investasi pertambangan berperan sebagai agen perubahan struktural yang membentuk ulang relasi sosial dan pola kehidupan masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan pertambangan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Kata kunci : Investasi Pertambangan, Perubahan Sosial, Dampak Lingkungan, Aceh Barat

Pendahuluan

Sektor pertambangan memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, terutama di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Dalam kerangka pembangunan daerah, investasi pertambangan kerap diposisikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur (Putri et al., 2020; Sorot News, 2025). Namun demikian, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa investasi pertambangan tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan lingkungan yang kompleks bagi masyarakat lokal (Hadi et al., 2025).



Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki potensi sumber daya tambang yang signifikan, khususnya batubara. Potensi sumber daya batubara di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 1,7 miliar ton, dengan cadangan yang telah teridentifikasi mencapai ratusan juta ton (Fachlevi, 2015). Kondisi ini menjadikan Aceh Barat sebagai salah satu daerah tujuan utama investasi pertambangan, dengan konsentrasi aktivitas yang cukup tinggi di beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Meureubo. Sejumlah perusahaan pertambangan batubara beroperasi di wilayah ini dan menjadi aktor penting dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah.

Masuknya investasi pertambangan di Aceh Barat sejalan dengan peningkatan realisasi investasi daerah dalam beberapa tahun terakhir. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar nilai investasi, dengan kontribusi lebih dari separuh total realisasi investasi pada tahun 2025 (DPMPTSP Aceh Barat, 2025). Kecamatan Meureubo tercatat sebagai wilayah dengan nilai investasi tertinggi, menegaskan peran strategis sektor pertambangan dalam struktur ekonomi daerah (DPMPTSP Aceh Barat, 2025). Peningkatan investasi tersebut juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar wilayah tambang.

Meskipun demikian, kehadiran investasi pertambangan tidak serta-merta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Berbagai kajian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Aceh Barat membawa dampak sosial yang beragam (Fachlevi, 2015). Di satu sisi, sebagian masyarakat memperoleh manfaat berupa peluang kerja dan peningkatan pendapatan.

Di sisi lain, sebagian masyarakat justru mengalami tekanan sosial dan ekonomi akibat berkurangnya lahan pertanian, degradasi lingkungan, serta perubahan ruang hidup (Muhsinina et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari investasi pertambangan tidak selalu sebanding dengan beban sosial dan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat lokal.

Perubahan sosial yang muncul akibat investasi pertambangan di Aceh Barat tercermin dalam pergeseran mata pencaharian masyarakat, perubahan relasi sosial, serta meningkatnya potensi konflik, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan lahan dan akses terhadap peluang kerja (Broadcast Puja TV, 2022; Tjoetra & Suadi, 2023). Perbedaan kepentingan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah turut membentuk dinamika sosial yang kompleks. Dalam beberapa kasus, ketimpangan distribusi manfaat investasi memperlemah solidaritas sosial dan memunculkan ketegangan antarwarga maupun antara masyarakat dan perusahaan pertambangan.

Dengan demikian, investasi pertambangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena ekonomi, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan relasi kekuasaan, kepentingan modal, serta posisi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Perubahan sosial yang terjadi mencakup perubahan struktur sosial, pola interaksi, serta relasi antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis sosiologis menjadi penting untuk melihat bagaimana investasi pertambangan berperan sebagai agen perubahan sosial dan bagaimana masyarakat merespons serta menegosiasikan perubahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter investasi pertambangan yang berkembang di Aceh Barat serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial yang dialami masyarakat. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan faktor-faktor sosial yang memengaruhi munculnya perubahan tersebut dengan menggunakan perspektif sosiologi. Dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, laporan resmi, dan pemberitaan media, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai relasi antara investasi pertambangan dan perubahan sosial masyarakat di Aceh Barat.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi pembangunan dan perubahan sosial, khususnya dalam konteks pembangunan berbasis sumber daya alam di daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan investasi pertambangan yang lebih sensitif terhadap dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, temuan, dan data sekunder yang telah dipublikasikan, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun dokumen resmi, untuk memahami investasi pertambangan dan perubahan sosial masyarakat di Aceh Barat (Sumilih et al., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas artikel jurnal ilmiah yang membahas pertambangan dan perubahan sosial, laporan pemerintah serta lembaga resmi yang berkaitan dengan investasi pertambangan, berita media daring yang memuat informasi tentang dinamika investasi pertambangan di Aceh Barat, serta dokumen publik lain yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut dipilih dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan konteks sosial masyarakat daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database jurnal ilmiah, seperti Google Scholar dan Garuda, untuk memperoleh literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, data juga dikumpulkan dari pemberitaan media daring yang membahas perkembangan investasi pertambangan di Aceh Barat. Seluruh data yang terkumpul kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan investasi pertambangan dan perubahan sosial masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Data yang telah dikategorikan ke dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dianalisis untuk mengidentifikasi pola perubahan sosial yang muncul. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif sosiologi guna menjelaskan hubungan antara investasi pertambangan dan perubahan sosial masyarakat di Aceh Barat.

Pembahasan/hasil

A. Gambaran Umum Investasi Pertambangan di Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam mineral yang signifikan dan menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi pertambangan di Provinsi Aceh. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh kawasan daratan yang kaya akan sumber daya mineral dan bahan galian, seperti pasir sungai dan batuan, yang dimanfaatkan dalam kegiatan pertambangan. Kondisi tersebut menjadikan Aceh Barat memiliki daya tarik ekonomi yang kuat bagi sektor pertambangan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Perkembangan investasi pertambangan di Aceh Barat menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada triwulan III tahun 2025, realisasi investasi sektor pertambangan mencapai Rp359,6 miliar dan menjadikannya sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah (DPMPTSP Aceh Barat, 2025). Secara kumulatif, nilai investasi sektor ini mencapai Rp643,2 miliar hingga September 2025, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 33 persen dibandingkan periode sebelumnya (Line1News, 2025). Peningkatan investasi tersebut turut berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, dengan ratusan tenaga kerja terserap dalam aktivitas pertambangan di wilayah ini. Kondisi ini memperkuat posisi sektor pertambangan sebagai sektor unggulan dalam struktur ekonomi Aceh Barat.

Meskipun demikian, dari sisi sosial, masyarakat Aceh Barat pada dasarnya masih bergantung pada sektor-sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai sumber penghidupan utama. Masuknya investasi pertambangan, yang umumnya bersifat ekstraktif dan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pasar yang lebih luas, membawa perubahan pada struktur ekonomi lokal (Nisa et al., 2025). Aktivitas pertambangan tidak hanya menggeser orientasi ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi ruang hidup dan pola aktivitas sosial di sekitar wilayah pertambangan (Hasanah et al., 2025).

Dalam praktiknya, investasi pertambangan di Aceh Barat melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Pemerintah daerah

berperan sebagai pihak yang memberikan izin dan menetapkan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, perusahaan pertambangan bertindak sebagai pelaku utama kegiatan investasi, sementara masyarakat lokal berada pada posisi yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Relasi antara aktor-aktor tersebut sering kali bersifat asimetris, terutama dalam hal penguasaan lahan dan distribusi manfaat ekonomi. Sejumlah kasus menunjukkan munculnya konflik sosial terkait penguasaan ruang hidup.

B. Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat

Masuknya investasi pertambangan di Aceh Barat telah mendorong terjadinya pergeseran mata pencaharian masyarakat lokal secara signifikan. Aktivitas pertambangan membuka peluang kerja baru yang menarik sebagian masyarakat untuk beralih dari sektor ekonomi tradisional, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, ke pekerjaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sektor pertambangan. Peralihan ini umumnya dipahami sebagai strategi adaptif masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, terutama di tengah terbatasnya kesempatan kerja di sektor lain.

Di beberapa wilayah, khususnya di sekitar pusat aktivitas pertambangan, sektor tambang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat (Hasrah et al., 2025). Kehadiran perusahaan pertambangan juga dikaitkan dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan infrastruktur pendukung. Selain itu, sebagian perusahaan menyediakan program sosial seperti bantuan pendidikan dan fasilitas tertentu bagi masyarakat sekitar, yang semakin memperkuat daya tarik sektor pertambangan sebagai sumber penghidupan baru.

Namun, perubahan mata pencaharian tersebut tidak berlangsung tanpa konsekuensi. Peralihan ke sektor pertambangan berjalan seiring dengan melemahnya sektor-sektor ekonomi tradisional yang sebelumnya menjadi basis utama kehidupan masyarakat. Alih fungsi lahan serta degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan mengurangi ruang

produksi bagi petani dan nelayan. Kelompok nelayan, misalnya, mengalami penurunan produktivitas akibat pencemaran dan limbah kegiatan tambang yang memengaruhi kualitas perairan (Hasanah et al., 2025). Kondisi ini memaksa sebagian masyarakat untuk meninggalkan mata pencaharian lamanya dan beralih ke sektor informal, seperti jasa logistik atau pekerjaan tidak tetap lainnya, yang umumnya memiliki tingkat keamanan ekonomi yang lebih rendah.

Dalam jangka panjang, ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan berpotensi menciptakan struktur ekonomi lokal yang tidak seimbang. Ketika sektor pertambangan menjadi sumber utama penghidupan, keberlanjutan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada keberlangsungan operasi perusahaan tambang. Risiko sosial muncul ketika aktivitas pertambangan mengalami penurunan atau berhenti, karena masyarakat telah kehilangan basis ekonomi alternatif yang sebelumnya menopang kehidupan mereka.

C. Perubahan Relasi Sosial dan Dinamika Masyarakat

Investasi pertambangan di Aceh Barat selain berdampak pada struktur ekonomi masyarakat, juga memicu transformasi yang signifikan dalam relasi sosial dan dinamika kehidupan komunal. Kehadiran aktivitas pertambangan telah menggeser pola interaksi sosial masyarakat dari relasi berbasis solidaritas tradisional menuju relasi yang semakin transaksional dan berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek (Aryos Nivada, 2014). Perubahan ini terlihat jelas dalam meningkatnya konflik lahan dan akses terhadap sumber daya, yang kemudian memecah masyarakat ke dalam kelompok pro dan kontra terhadap aktivitas pertambangan.

Konflik penguasaan lahan menjadi salah satu sumber utama ketegangan sosial. Perbedaan kepentingan antara masyarakat pemilik lahan, perusahaan pertambangan, penambang ilegal, dan pemerintah daerah menciptakan polarisasi horizontal antarwarga (Aryos Nivada, 2014). Sebagian masyarakat mendukung pertambangan karena membuka peluang kerja dan sumber pendapatan baru, sementara kelompok lainnya menolak karena merasa terancam kehilangan ruang hidup, sumber ekonomi

tradisional, serta hak atas tanah (Putra, 2025; RAIS, 2022). Polarisasi ini tidak jarang berkembang menjadi konflik terbuka, baik dalam bentuk protes, penolakan sosial, maupun ketegangan berkepanjangan di tingkat gampong.

Transformasi relasi sosial tersebut dapat diamati secara konkret di sejumlah wilayah seperti Gampong Paya Baro dan Buloh (Hasrah et al., 2025; Nisa et al., 2025). Di wilayah ini, masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ikatan komunal yang kuat mulai beralih ke aktivitas pendukung pertambangan, seperti jasa ojek, logistik, dan perdagangan informal di sekitar lokasi tambang. Perubahan orientasi ekonomi ini secara perlahan mengikis ikatan sosial tradisional dan memicu fragmentasi internal masyarakat. Studi kualitatif menunjukkan bahwa pertemuan-pertemuan desa yang dahulu menjadi ruang musyawarah kini kerap diwarnai adu argumen tajam akibat perbedaan sikap terhadap pertambangan, menandai melemahnya kohesi sosial.

Secara normatif, kekayaan sumber daya alam berupa tambang seharusnya menjadi berkah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, realitas di Aceh Barat menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan yang tidak tunduk pada regulasi, lemahnya pengawasan, serta perilaku oportunistik pelaksana justru menjadikan tambang sebagai sumber konflik sosial. Fenomena serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Aceh, seperti Pidie, Aceh Jaya, dan Aceh Besar, yang menegaskan bahwa konflik pertambangan merupakan persoalan struktural dan sistemik, bukan kasus yang berdiri sendiri (RAIS, 2022).

Perubahan relasi sosial akibat investasi pertambangan di Aceh Barat memperlihatkan bagaimana pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya dapat menciptakan disintegrasi sosial apabila tidak diiringi dengan keadilan struktural, pemberdayaan ekonomi lokal, dan tata kelola yang akuntabel.

D. Dampak Lingkungan dan Konsekuensi Sosial

Aktivitas investasi pertambangan di Aceh Barat dan wilayah barat-selatan Aceh secara umum telah menimbulkan tekanan ekologis yang serius

dan berdampak langsung terhadap tatanan sosial masyarakat. Pertambangan komoditas emas dan batu bara, baik yang berizin maupun ilegal, berlangsung dalam skala masif dan kerap tidak diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang memadai. Akibatnya, perubahan bentang alam, degradasi hutan, pencemaran sungai, serta meningkatnya risiko bencana ekologis menjadi fenomena yang semakin nyata dalam kehidupan masyarakat sekitar tambang.

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2020 terdapat sekitar 28 Izin Usaha Pertambangan (IUP) logam dan batubara di Aceh dengan luas lebih dari 70.700 hektare. Di luar aktivitas legal tersebut, pertambangan emas ilegal justru berkembang lebih luas dan sulit dikendalikan. Perkiraan lembaga lingkungan menunjukkan bahwa area tambang emas tanpa izin di Aceh mencapai puluhan ribu hektare, dengan Aceh Barat sebagai salah satu wilayah terdampak paling signifikan (Muhammad Irham, 2025). Praktik penambangan ilegal yang dilakukan di kawasan hutan lindung dan bantaran sungai telah menyebabkan deforestasi besar-besaran, kerusakan tanah, serta pencemaran air oleh lumpur dan logam berat, termasuk merkuri yang digunakan dalam pengolahan emas.

Kerusakan lingkungan ini berdampak langsung terhadap keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber air bersih, irigasi pertanian, dan ruang aktivitas sosial kini berubah menjadi keruh dan tercemar, sehingga tidak lagi layak digunakan. Penurunan kualitas lingkungan tersebut berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian, perikanan darat, serta meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir dan longsor akibat berkurangnya daya serap tanah.

Kerusakan lingkungan juga berkonsekuensi langsung pada meningkatnya ketegangan sosial antara masyarakat, perusahaan pertambangan, dan pemerintah. Berbagai protes dan penolakan muncul ketika masyarakat merasakan secara langsung dampak negatif aktivitas tambang terhadap ruang hidup mereka. Kasus penutupan sementara aktivitas pertambangan emas oleh DPRK Aceh Barat terhadap perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Woyla dan Sungai Mas menunjukkan bahwa

tekanan sosial akibat kerusakan lingkungan telah mencapai titik yang memaksa otoritas lokal untuk mengambil tindakan korektif (Puja TV, 2025). Aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tercemarnya sumber air, rusaknya lahan pertanian, serta meningkatnya risiko banjir dan longsor menjadi dasar kuat lahirnya kebijakan tersebut.

E. Analisis Sosiologis

Dalam perspektif sosiologi pembangunan, investasi pertambangan di Aceh Barat dapat dipahami sebagai agen perubahan sosial struktural yang bekerja melalui kombinasi kekuatan ekonomi, kebijakan negara, dan relasi kuasa (Sudarsono, 2024). Masuknya modal, teknologi, dan rezim pengelolaan sumber daya alam tidak hanya merekonfigurasi struktur ekonomi lokal, tetapi juga mengubah cara masyarakat memaknai ruang hidup, pekerjaan, serta relasi sosialnya. Perubahan mata pencaharian, fragmentasi sosial, dan degradasi lingkungan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pertambangan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan proses sosial yang membentuk ulang tatanan kehidupan masyarakat.

Secara ekonomi-politik, investasi pertambangan menciptakan asimetris akses terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Negara dan perusahaan berada pada posisi dominan dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam, sementara masyarakat lokal cenderung ditempatkan sebagai penerima dampak, bukan pengambil keputusan.

Ketimpangan ini tampak pada distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata, di mana sebagian kecil masyarakat memperoleh keuntungan melalui akses kerja atau kompensasi, sementara kelompok lain harus menanggung beban sosial dan ekologis dalam jangka panjang. Dalam kerangka ini, relasi antara negara, pasar, dan masyarakat memperlihatkan pola kekuasaan yang timpang, di mana logika pertumbuhan ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan sosial.

Dari sudut pandang perubahan sosial, investasi pertambangan juga mendorong pergeseran nilai dan orientasi kehidupan masyarakat. Praktik

ekonomi berbasis komunal dan keberlanjutan perlahan tergeser oleh pola relasi yang lebih transaksional dan pragmatis. Ketika akses terhadap sumber daya ditentukan oleh kedekatan dengan perusahaan atau otoritas, solidaritas sosial melemah dan kohesi komunitas terfragmentasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengikis modal sosial masyarakat, yang sebelumnya menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tekanan struktural.

Namun demikian, analisis sosiologis juga perlu bersikap berimbang dengan mengakui bahwa investasi pertambangan tidak sepenuhnya bersifat destruktif. Dalam konteks tertentu, pertambangan telah membuka akses terhadap lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang sebelumnya sulit diwujudkan.

Bagi sebagian masyarakat, keterlibatan dalam sektor pertambangan dipandang sebagai strategi rasional untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah keterbatasan pilihan ekonomi. Oleh karena itu, problem utama bukan terletak pada keberadaan investasi pertambangan itu sendiri, melainkan pada cara pengelolaan, distribusi manfaat, dan mekanisme pengendalian dampaknya.

Kritik sosiologis terhadap pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan berisiko melahirkan apa yang disebut sebagai *pembangunan eksklusif* (Wirutomo, 2013). Pembangunan semacam ini menghasilkan statistik pertumbuhan yang positif, tetapi menyisakan kerentanan sosial, konflik, dan kerusakan ekologis di tingkat lokal. Dalam konteks Aceh Barat, kondisi tersebut menegaskan perlunya reorientasi pembangunan pertambangan dari pendekatan yang semata-mata ekstraktif menuju pendekatan yang partisipatif, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Investasi pertambangan di Aceh Barat terbukti menjadi faktor perubahan sosial yang signifikan, baik dalam struktur ekonomi, relasi sosial, maupun kondisi lingkungan masyarakat lokal. Masuknya aktivitas

pertambangan telah mendorong peralihan mata pencaharian masyarakat dari sektor-sektor tradisional menuju sektor ekstraktif, yang pada satu sisi membuka peluang ekonomi baru, namun pada sisi lain menimbulkan ketergantungan dan kerentanan sosial dalam jangka panjang.

Dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan, khususnya degradasi hutan, pencemaran sungai, dan meningkatnya risiko bencana ekologis, berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga memicu konflik sosial, melemahkan solidaritas komunitas, serta memperuncing ketimpangan relasi antara masyarakat, perusahaan, dan negara.

Secara sosiologis, investasi pertambangan beroperasi sebagai agen perubahan struktural yang bekerja melalui relasi kuasa yang timpang dan distribusi manfaat yang tidak merata. Pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro, sementara dampak sosial dan ekologis lebih banyak ditanggung oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi kebijakan pertambangan menuju pendekatan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal

Daftar Pustaka

- Aryos Nivada. (2014). *Ketika Tambang Mendulang Konflik – Jaringan Survei Inisiatif*. <https://jsinisiatif.id/2014/11/22/ketika-tambang-mendulang-konflik/>
- Broadcast Puja TV. (2022, January 19). *Tanah Adat Diserobot, Warga Aceh Barat Blokir Akses Ke Perusahaan Tambang Batu Bara | PUJATV ACEH*. <https://pujatvaceh.com/tanah-adat-diserobot-warga-aceh-barat-blokir-akses-ke-perusahaan-tambang-batu-bara/>
- DPMPTSP Aceh Barat. (2025). *Realisasi Investasi Aceh Barat Triwulan III Tahun 2025 Tembus Rp359,6 Miliar*. <https://dpmpstsp.acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/realisasi-investasi-aceh-barat-triwulan-iii-tahun-2025-tembus-rp359-6-miliar>

- Fachlevi, T. A. (2015). *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Ekonomi Lingkungan Dan Sosial Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. [Thesis, Bogor Agricultural University (IPB)]. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78898>
- Hadi, S., Djimar, S., & Mane, H. O. (2025). Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Terhadap Masyarakat di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.B), 290–294.
- Hasanah, U., Sari, Y. M., Rahma, Z., Alamsyah, F., & Sopar. (2025). Perubahan Ekologi dan Pola Tangkap Nelayan Gampong Ujong Drien Akibat Trasportasi Bongkar Muat Batu Bara di Pesisir Laut Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(3), 1149–1157. <https://doi.org/10.61579/future.v3i3.541>
- Hasrah, O., Chairil, M., Fitria, A., Febriani, A., & Sopar. (2025). Makna Sosial Industri Tambang Batu Bara bagi Masyarakat Gampong Buloh Kecamatan Meureubo Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 384–394. <https://doi.org/10.63822/3b39qm40>
- Line1News. (2025, October 31). Investasi Aceh Barat Melesat 33 Persen, Tambang dan Perkebunan Jadi Motor Utama. *Line1News*. <https://line1.news/investasi-aceh-barat-melesat-33-persen-tambang-dan-perkebunan-jadi-motor-utama/>
- Muhammad Irham. (2025). *KKN dan Kerusakan Lingkungan pada Sektor Pertambangan di Barat-Selatan Aceh*. Serambinews.com. <https://aceh.tribunnews.com/2025/06/17/kkn-dan-kerusakan-lingkungan-pada-sektor-pertambangan-di-barat-selatan-aceh>
- Muhsinina, M., Anisa, N., Jurnita, J., Hamdi, R., & Sopar, S. (2025). Adaptasi Petani Padi Di Lingkar Industri Tambang Batu Bara Pada Gampong Blang Geunang Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(8), 3435–3438. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i8.2025.3435-3438>
- Nisa, W. K., Wahyuni, R., Arisky, W., Sabitah, N., & Sopar. (2025). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Lingkar Tambang Batu Bara di Gampong Paya Baro Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat. *Sagita Academia Journal*, 3(3), 82–87. <https://doi.org/10.61579/sagita.v3i3.523>

- Puja TV. (2025, September 26). *Rusak Lingkungan, DPRK Aceh Barat Rekomendasikan Tutup Tambang Emas Sementara* | PUJATV ACEH. <https://pujatvaceh.com/rusak-lingkungan-dprk-aceh-barat-perintahkan-tutup-tambang-emas-sementara/>
- Putra. (2025, October 5). *Masyarakat Aceh Barat Berbeda Sikap Terhadap Tambang Emas, Ada Yang Menolak Keras Dan Ada Pula Meminta Diberikan Izin*—Mediasatunews.com. <https://www.mediasatunews.com/masyarakat-aceh-barat-berbeda-sikap-terhadap-tambang-emas-ada-yang-menolak-keras-dan-ada-pula-meminta-diberikan-izin/>
- Putri, W. E. C., Zamroni, A., & Widiatmoko, F. R. (2020). Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Nilai Produk Domestik Regional Bruto Dan Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur. *Kurvatek*, 5(2), 71–76. <https://doi.org/10.33579/krvtek.v5i2.1854>
- RAIS. (2022). *Manajemen Konflik Pengelolaan Pertambangan Emas Legal Dan Ilegal Di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209874>
- Sorot News. (2025, November 13). Sektor Pertambangan Jadi Penggerak Ekonomi Daerah, Kontribusi Capai 8,5 Persen Terhadap PDB Nasional. *Sorot News*. <https://www.sorotnews.co.id/2025/11/13/sektor-pertambangan-jadi-penggerak-ekonomi-daerah-kontribusi-capai-85-persen-terhadap-pdb-nasional/>
- Sudarsono, S. (2024). Sosiologi Pembangunan. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/849>
- Sumilih, D. A., Jaya, A., Fitriainingsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., Rachmaningtyas, N. A., Ras, A., Pujiriyani, D. W., Setyorini, N., Hermawan, S., Ulfah, S., & Kurniasih, U. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Tjoetra, A., & Suadi. (2023). Transformasi Konflik Dalam Pembangunan Industri Pertambangan Di Aceh Barat. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 303–308.

Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1), 108–127. <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1254>